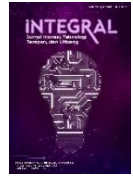


Integral: Jurnal Inovasi, Teknologi Terapan, dan Litbang

Volume 2 No 2 (2023), Halaman: 111-122

e-ISSN: 2961-8274, p-ISSN: 2962-0201

Journal Homepage: <https://jurnal.purworejokab.go.id/index.php/integral>



Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Pelayanan Online di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Aplikasi Jogjakita)

Yujitia Ahdarrijal^{1,2} ✉

Yogyakarta, Indonesia⁽¹⁾

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia ⁽²⁾

✉ y.ahdarrijal.psc23@mail.umy.ac.id

Kata kunci:
Collaborative
Governance, Regulasi,
Kepemimpinan,
Sumber Daya
Manusia, UMKM

Abstrak

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) penting dalam pemerintahan dan kunci dari perekonomian. UMKM menerapkan *collaborative governance* sebagai solusi pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *collaborative governance* oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, menguji pengaruh dari regulasi, kepemimpinan, sumber daya manusia, Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah *mix method*, campuran antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasilnya penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi, kepemimpinan, dan sumber daya mempengaruhi implementasi *collaborative governance* dengan tingkat pengaruh yang moderat dengan nilai *R-Square* 0.462. Dan ditemukan bahwa variabel kepemimpinan tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap implementasi *collaborative governance*, sedangkan regulasi dan sumber daya manusia berdampak positif dan signifikan pada penelitian ini.

Keywords:
Collaborative
Governance,
Regulation,
Leadership, Human
Resources, MSMEs

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are important in government and key to the economy. MSMEs implement collaborative governance as a solution to the Covid-19 pandemic. This study aims to determine the implementation of collaborative governance by the Office of Cooperatives and SMEs of the Special Region of Yogyakarta, examine the influence of regulation, leadership, human resources, The method used in this study is a mix method, a mixture of qualitative and quantitative approaches. The results of this study show that regulation, leadership, and resources affect the implementation of collaborative governance with a moderate level of influence with an *R-Square* value of 0.462. And it was found that leadership variables did not have a positive and significant effect on the implementation of collaborative governance, while regulations and human resources had a positive and significant impact on this study.



DOI: 10.57122/integral.v2i2.31

1. LATAR BELAKANG

1.1. Pendahuluan

Dunia pemerintahan membutuhkan berbagai aspek dalam mendukung roda pemerintahannya khususnya di Indonesia sendiri. Era serba modern saat ini menjadi salah satu hal yang mendorong pemerintah untuk terus menyesuaikan zaman khususnya dalam memberikan pelayanan terhadap publik. Negara memerlukan suatu tata kelola pemerintahan yang kuat dalam

mengembangkan tujuannya baik pemerintahan pusat maupun daerah [Maria & Halim, \(2021; Silsila Asri & Yahya Krisnawansyah, \(2022\)](#) Berjalannya suatu pemerintahan dalam mewujudkan tujuannya membutuhkan peraturan yang mempengaruhi keberhasilannya yang biasa disebut dengan regulasi. Semakin berkembangnya era saat ini menjadikan banyak hal digapai dengan sangat mudah tanpa adanya benteng dan hal tersebut sangat mempengaruhi kehidupan manusia di suatu negara [Tasyah et al., \(2021\)](#).

Permasalahan berbagai aspek kehidupan negara karena hadirnya pandemic Covid-19 menjadikan banyak hal yang harus diperhatikan [Wibawa, \(2020\)](#). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan terkait dengan beberapa hal di dunia pemerintahan yang menjadi salah satu kunci perekonomian Indonesia [Sudiman et al., \(2020\)](#) salah satunya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DIY, Tri Saktiyana, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Daerah Yogyakarta memiliki keunikan tersendiri dari temporer hingga kekinian karena dari Sumber Daya Manusia yang ada industri kreatif dipegang oleh berbagai kalangan. Kemudian keunikan lain yang dimiliki oleh UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pada dua jenis yaitu formal dan non-formal yang mana keduanya memiliki nilai yang menggambarkan kapasitas untuk menyelamatkan perekonomian [Wijoyo & Widiyanti, \(2020\)](#).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu implementasi dari hadirnya collaborative governance [Ruijter & Meijer, \(2020\)](#). Collaborative governance menjadi suatu solusi untuk bangkit saat pandemic berlangsung khususnya kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah dengan stakeholders [Abdul Wahid, \(2021\)](#). Banyak hal yang dilakukan pada masa pandemic untuk saling membantu dalam bangkit di situasi yang sulit dan terbatas sehingga kolaborasi yang dilakukan tidak terbatas. Pada dasarnya, hadirnya konsep kolaborasi di dalam pemerintahan akan memberikan keuntungan satu sama lain khususnya terkait sumber daya. Sumber daya akan menghadirkan peluang untuk saling menguntungkan dengan berbagi dan mengambil manfaat sumber daya yang ada bisa dikatakan terbatas. Hal tersebut kaitannya sumber daya dengan implementasi dari konsep collaborative governance adalah capacity for join action sebagai bagian dari collaborative dynamics [Rozikin et al., \(2020\)](#).

Situasi pandemi juga menghadirkan banyaknya regulasi khususnya terkait Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi salah satu fokus ketika pandemi Covid-19. Kehadiran berbagai regulasi tersebut sangat berkaitan erat dengan implementasi suatu konsep collaborative governance dalam dunia pemerintahan yang mana pada situasi tersebut seluruh bagian dari negara memiliki tujuan untuk bangkit dan berdampingan hidup dengan bencana pandemic yang terjadi dan tidak hanya dilakukan antar sektor saja namun antara pemerintah dengan stakeholders [Nasrullah, \(2018\)](#). Selain terkait regulasi, Indonesia yang merupakan sebuah negara dengan konsep desentralisasi ini menggiring pemerintah daerah menjadi kunci dari kemajuan daerah masing-masing. Hal tersebut merupakan fenomena yang terjadi di pemerintahan sebagai suatu dinamika. Kepemimpinan pada setiap daerah menjadi hal yang penting juga dalam implementasi collaborative governance [Cahyarini, \(2021\)](#). Kepemimpinan dalam implementasi collaborative governance memberikan suatu fasilitas yang ditujukan untuk berbagai pihak yang terikat dengan tujuan untuk mampu bertukar pikiran untuk mendapatkan kesepakatan yang mufakat [Ipan et al., \(2021\)](#). Setiap pemimpin di daerah menerapkan konsep kolaborasi dalam pemerintahan yang dipimpin dan hal tersebut menjadi solusi dalam menjawab tantangan yang semakin kompleks .

1.2. Tinjauan Pustaka

[Muammar et al., \(2021\)](#) mendefinisikan *Collaborative governance* sendiri merupakan suatu konsep dari pengembangan *governance* yang memiliki tujuan dalam efektivitas Pembangunan. *Collaborative governance* dalam implementasinya memberikan kekuatan dalam kolaborasi atau kerja sama dari berbagai sector yang mana memberikan perkembangan dari hadirnya kolaborasi secara nyata yang disampaikan kepada masyarakat yang mampu menghadirkan informasi yang diperoleh dan dapat diterima dan dimengerti dengan baik oleh publik. Implementasi *collaborative governance* dalam rangka mewujudkan kemandirian desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sesuai dengan prinsip-prinsip di dalamnya [Rahmadi et al., \(2021\)](#). Implementasi suatu konsep *collaborative governance* di dalam beberapa kebijakan dan regulasi belum terlaksana dengan efektif diikuti hadirnya kendala dan hambatan termasuk berbagai kebijakan baru di dalam menghadapi situasi pandemic di Indonesia [Cahyani et al., \(2022\)](#).

Menurut [Wahyuni et al., \(2020\)](#) regulasi secara umum adalah upaya yang diciptakan untuk mengendalikan manusia atau masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam kehidupan bersama dari uraian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan regulasi adalah sebuah peraturan yang dibuat untuk mengendalikan dan membatasi manusia atau masyarakat dengan tujuan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam kehidupan bersama atau dalam sebuah negara. Di dalam penyelenggaraan negara, regulasi adalah instrumen untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara [Dorania Lumbanraja, \(2020\)](#).

Kepemimpinan merupakan suatu sikap seorang pimpinan yang berkorelasi dengan bidang pekerjaan para pemimpin yang mampu menghadirkan berbagai pemikiran baru dalam berlangsungnya suatu proses interaksi dalam dunia pekerjaan dengan menerapkan prosedur yang sesuai dengan tuntutan eksternal maupun internal [Alfrida & Astuti, \(2019\)](#). Kepemimpinan sendiri merupakan suatu sifat yang bisa dikatakan tegas dan mampu menentukan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan moral dan logika dengan berbagai ukuran bagi pemimpin di dalam suatu pemerintahan [Andana et al., \(2021\)](#).

[Kusumawardhani & Muanas, \(2019\)](#) memaknai Sumber daya merupakan suatu asset yang memiliki urgensi di dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuannya dan sebagai penggerak utama di dalam seluruh kegiatan di dalamnya. Sumberdaya yang siap akan mumpuni dalam memberikan suatu kontribusi di dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang dimiliki dengan proses manajemen yang baik [Atika et al., \(2020\)](#).

2. METODE

2.1. Rancangan Penelitian

Dengan tujuan penelitian untuk menjelaskan tingkat pengaruh regulasi, kepemimpinan, dan sumberdaya terhadap implementasi *collaborative governance*, maka penelitian ini bertipe sebagai penelitian survey. Penelitian survey adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan bentuk aktivitas yang menjadi rutinitas pada masyarakat bidang ilmiah dengan menanyakan pertanyaan yang ditujukan kepada sejumlah responden akan kepercayaan, pendapat, khas, dan rutinitas yang sedang atau sudah terjadi [Budiastuti & Bandur, \(2018\)](#). Kemudian penelitian ini juga menggunakan metode kuantitatif yang mana penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian dengan menggunakan metode yang berdasarkan data statistik dan analisis data akan bisa dilakukan Ketika semua data sudah terkumpul [Sugiyono, \(2018\)](#).

Di dalam penelitian ini, populasi nya adalah seluruh pegawai yang mengimplementasikan *collaborative governance* di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan *stakeholders* yang terlibat di dalam kerja sama. Jumlah pegawai dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 95 orang, dari Pegawai JogjaKita 375 orang dan pengguna aplikasi JogjaKita 3.707 orang. Sampel menjelaskan bahwa dalam melakukan pengkajian terkait dengan sampel yang hal tersebut merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang terdapat di dalam populasi tersebut. Jumlah sampel yang diteliti akan dihitung dengan rumus Slovin karena jumlah populasi yang relatif besar, dengan batas toleransi kesalahan 10% yaitu:

$$n = \frac{N}{1+N(e^2)}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas toleransi kesalahan (10%)

$$n = \frac{4.134}{1+4.134(0,01)}$$

$$n = \frac{4.134}{1+41,34} = \frac{4.134}{42,34} = 97,63 = 98 \text{ orang.}$$

Dibulatkan menjadi 100 orang/sample.

Sehingga pada penelitian ini diambil sample dari total keseluruhan populasi sebanyak 100 responden.

2.2. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan SEM-PLS yang merupakan suatu metode analisis data. SEM (*Structural Equation Model*) dengan asumsi seperti teori yang sudah seharusnya mendukung, jumlah sampel yang besar, dan data yang disalurkan secara normal untuk memecahkan isu yang ada dengan PLS yang digunakan dalam jumlah sampel yang kecil [Juliandi, \(2018\)](#). SEM-PLS di dalam penelitian ini bertujuan untuk menghitung validitas dan reliabilitas serta menguji hipotesis dan regresi.

Validitas merupakan ketepatan akan alat atau instrument penelitian di dalam melakukan pengukuran akan sesuatu yang akan diukur di dalam penelitian dengan berbagai teknik di dalamnya [Budiastuti & Bandur, \(2018\)](#). Menurut [Yusup, \(2018\)](#), reliabilitas merupakan salah satu faktor utama yang dipertimbangkan oleh para peneliti dalam konsep penelitian yang akan dilakukan. Kemudian uji regresi merupakan suatu aktivitas dalam melakukan penelitian untuk mengetahui kemampuan akan suatu variable dengan berbagai jenis yang disesuaikan dengan penelitian untuk mengetahui suatu koerelasi antar variabel [Cohen et al., \(2018\)](#).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data dari tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Implementasi *Collaborative Governance* menunjukkan bahwa rata-rata terendah berada pada indikator organisasi non-pemerintahan punya adil besar dalam proses pembuatan keputusan dalam kolaborasi yaitu sebesar (3,95) dan rata-rata tertinggi pada indikator teknologi informasi digunakan untuk kolaborasi, sebesar (4,10). Oleh sebab itu rata-rata variabel Implementasi *Collaborative Governance* secara keseluruhan sebesar 4,02 sehingga dari nilai variabel tersebut menunjukkan berada pada interval 3,43 – 4,21 hal tersebut menunjukkan bahwa Implementasi *Collaborative Governance* dalam melaksanakan kolaborasi antara pemerintah dengan stakeholder dengan baik.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Implementasi *Collaborative Governance*

<i>Indikator</i>	<i>N</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	<i>Std Deviasi</i>
Instansi pemerintah berpartisipasi dalam penerapan kolaborasi	100	3	5	4,01	0,522
Organisasi non-pemerintahan berpartisipasi dalam penerapan kolaborasi	100	3	5	4,08	0,472
Organisasi non-pemerintahan punya adil besar dalam proses pembuatan keputusan dalam kolaborasi	100	2	5	3,95	0,578
Orientasi pemecahan masalah publik dalam kolaborasi	100	3	5	3,99	0,495
Teknologi informasi digunakan untuk kolaborasi	100	2	5	4,10	0,555
Jumlah rata-rata				4,02	

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata terendah berada pada indikator Aturan dari pemerintahan (Pusat) yaitu sebesar (3,90) dan rata-rata tertinggi pada indikator SOP (*Standard operating procedure*) yaitu sebesar (4,00). Rata-rata variabel regulasi secara keseluruhan sebesar 3,95. Dari hal tersebut, nilai dari variabel tersebut menunjukkan berada pada interval 3,43 – 4,21 hal tersebut menunjukkan bahwa regulasi dalam kolaborasi anatar pemerintahan dengan *stakeholde* diyakini tergolong baik.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Regulasi

<i>Indikator</i>	<i>N</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	<i>Std Deviasi</i>
Aturan dari pemerintahan (Pusat)	100	2	5	3,90	0,571
Aturan dari organisasi	100	2	5	3,96	0,602
SOP (<i>Standard operating procedure</i>)	100	2	5	4,00	0,572
Jumlah rata-rata				3,95	

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata terendah berada pada indikator yaitu Kemampuan pengarahan sebesar (4,16) dan rata-rata tertinggi pada indikator Kemampuan

menyelesaikan masalah yaitu sebesar (4,20). Rata-rata variabel kepemimpinan secara keseluruhan sebesar 4,18. Dari hal tersebut, nilai dari variabel tersebut menunjukkan berada pada interval 3,43 – 4,21 hal tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam kolaborasi anatar pemerintahan dengan *stakeholder* diyakini tergolong baik.

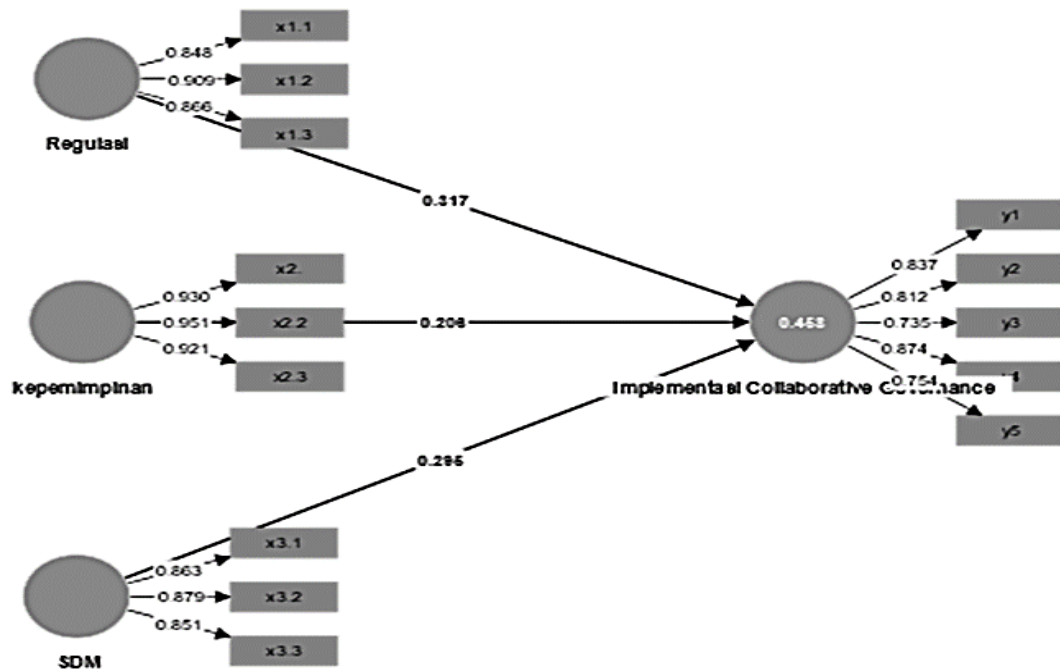
Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Kepemimpinan

<i>Indikator</i>	<i>N</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	<i>Std Deviasi</i>
Kemampuan merancang pekerjaan	100	3	5	4,19	0,610
Kemampuan pengarahan	100	3	5	4,16	0,548
Kemampuan menyelesaikan masalah	100	3	5	4,20	0,541
Jumlah				4,18	

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata terendah berada pada indikator yaitu Pelatihan kolaborasi dengan *stakeholder* sebesar (3,97) dan rata-rata tertinggi pada indikator Kemampuan menggunakan teknologi informasi yaitu sebesar (4,07). Rata-rata variabel Sumber Daya Manusia secara keseluruhan sebesar 4,03. Dari hal tersebut, nilai dari variabel tersebut menunjukkan berada pada interval 3,43 – 4,21 hal tersebut menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia dalam kolaborasi anatar pemerintahan dengan *stakeholder* diyakini tergolong baik.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Sumber Daya Manusia

<i>Indikator</i>	<i>N</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	<i>Standar Deviasi</i>
Pelatihan kolaborasi dengan Stakeholders	100	2	5	3,97	0,530
Kemampuan melkukan interaksi dengan Stakeholders	100	3	5	4,05	0,464
Kemampuan menggunakan teknologi informasi	100	3	5	4,07	0,534
Jumlah				4,03	



Gambar 1. Perancangan Outer Model

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan perancangan model yang menunjukkan hubungan variabel *Regulasi*, *Kepemimpinan*, dan *Sumeber Daya Manusia* terhadap *Implementasi Collaborative Governance*. Dalam gambar diatas dijelaskan bahwa variabel X1 yaitu *regulasi* memiliki nilai *loading vector* X1.1 sebesar 0,848, X1.2 sebesar 0,909, dan X1.3 sebesar 0,866. Selanjutnya variabel X2 yaitu *kepemimpinan* memiliki nilai *loading vector* X2.1 sebesar 0,930, X2.2 sebesar 0,951, dan X2.3 sebesar 0,921. Kemudian variabel X3 yaitu *sumber daya manusia* memiliki nilai *loading vector* X3.1 sebesar 0,863, X3.2 sebesar 0,879, dan X3.3 sebesar 0,851. Dan yang terakhir yaitu variabel Y yaitu *Implementasi Collaborative Governance* memiliki nilai *loading vector* Y.1 sebesar 0,837, Y.2 sebesar 0,812, Y.3 sebesar 0,735, Y.4 sebesar 0,874, dan Y.5 sebesar 0,754.

Demikian juga dapat disimpulkan bahwasannya hasil output dari R-square yaitu *Implementasi Collaborative Governance* bahwa sebesar 0,462. Apabila dikaitkan dengan Rule of thumb dengan pengujian R-square maka model structural yang mempunyai hasil R-square sebesar 0,67 mengidentifikasi bahwa model (baik), apabila R-square sebesar 0,33 maka mengidentifikasi model (moderat), dan R-square sebesar 0,19 mengidentifikasikan model (lemah).

Dapat disimpulkan bahwa pada *Implementasi Collaborative Governance* dengan studi kasus kolaborasi Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dengan *stakeholder*, variabel yang mempengaruhi variabel *Implementasi Collaborative Governance* memiliki tingkat yang moderat.

Tabel 5. Cronbach's Alpha Dan Composite Reliability

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	<i>Keterangan</i>
Regulasi	0,847	0,855	Reliabel
Kepemimpinan	0,927	0,930	Reliabel
Sumber Daya Manusia	0,831	0,832	Reliabel
Implementasi Collaborative Governance	0,862	0,863	Realabel

Berdasarkan hasil pada output Composite Reliability dan Cronbach's Alpha pada tabel diatas menunjukan bahwa pada variabel *Regulasi* memiliki nilai composite reliability sebesar 0,855 dan nilai cronbach's alpha sebesar 0,847. Variabel *Kepemimpinan* memiliki nilai composite reliability sebesar 0,930 dan nilai cronbach's alpha sebesar 0,927. Variabel *Sumber Daya Manusia* memiliki nilai composite reliability sebesar 0,832 dan nilai cronbach's alpha sebesar 0,831. Dan pada variabel *Implementasi Collaborative Governance* memiliki nilai composite reliability sebesar 0,863 dan nilai cronbach's alpha sebesar 0,862.

Berdasarkan penjelasan diatas, nilai atau output composite reliability dan cronbach alpha pada tabel 5 menunjukan bahwa nilai masing-masing konstruk sudah diatas 0,70. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing konstruk dalam model yang diestimasi memiliki reliabilitas yang baik dan dapat dikatakan reliabel dan dapat dikatakan bahwa jawaban dari responden terhadap indikator alat ukur yang digunakan dalam kuesioner konsisten.

Tabel 6. Uji Hipotesa Dinas Koperasi dan UKM DIY dan Stakeholder

<i>Variabel</i>	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviantion (STDEV)</i>	<i>T-statistics (O/STDEV)</i>	<i>P Value</i>	<i>Penelitian dari Hipotesa</i>
<i>Regulasi</i>	0,317	0,323	0,107	2,959	0,003	Diterima
<i>Kepemimpinan</i>	0,206	0,216	0,129	1,600	0,110	Ditolak
<i>Sumber Daya Manusia</i>	0,295	0,283	0,134	2,196	0,028	Diterima

Uji Hipotesa 1

Ha: Regulasi mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap Implementasi *Collaborative Governance* dalam Kolaborasi antara Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dengan *stakeholder* (JogjaKita). Ho: Regulasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Implementasi *Collaborative Governance* dalam Kolaborasi antara Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dengan *stakeholder* (JogjaKita).

Disimpulkan bahwa hipotesa pertama (Ha) pada variabel Regulasi memiliki hasil yang sama dengan hipotesis akhir (Ho) sehingga hipotesis pertama (Ha) diterima dan terbukti. Hal ini disebabkan karena hipotesis akhir (Ho) yaitu Regulasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Implementasi *Collaborative Governance* dalam kolaborasi antara Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dengan *stakeholder* (JogjaKita). Dibuktikan pada tabel diatas menunjukkan bahwa temuan statistic pada variabel Regulasi mempengaruhi Implementasi *Collaborative Governance* dengan memiliki T-statistic 2,959 pada angka ini menunjukkan hasil T-statistic pada variabel Regulasi mempengaruhi Implementasi *Collaborative Governance* dengan standar pada T-statistic yaitu 1,96.

Selain itu, nilai P value pada variabel Regulasi dalam mempengaruhi Implementasi *Collaborative Governance* menunjukkan nilai 0,003 dimana nilai P value tersebut telah memenuhi kriteria yaitu tidak melampaui batas dari 0,05. Sehingga hipotesis pertama pada variabel Regulasi diterima atau terbukti.

Uji Hipotesa 2

Ha: Kepemimpinan mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap Implementasi *Collaborative Governance* dalam Kolaborasi antara Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dengan *stakeholder* (JogjaKita). Ho: Kepemimpinan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Implementasi *Collaborative Governance* dalam Kolaborasi antara Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dengan *stakeholder* (JogjaKita).

Disimpulkan bahwa hipotesis pertama (Ha) pada variabel Kepemimpinan berbeda dengan hipotesis akhir (Ho) sehingga hipotesis pertama (Ha) ditolak dan tidak terbukti. Hal ini disebabkan karena hipotesis akhir (Ho) yaitu Kepemimpinan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Implementasi *Collaborative Governance* dalam Kolaborasi antara Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dengan *stakeholder* (JogjaKita). Dibuktikan tabel diatas menunjukkan bahwa temuan statistic pada variabel Kepemimpinan tidak mempengaruhi Implementasi *Collaborative Governance* dalam Kolaborasi antara Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dengan *stakeholder* (JogjaKita) dengan memiliki T-statistic 1,600 pada angka ini menunjukkan hasil T-statistic pada variabel Kepemimpinan tidak mempengaruhi Implementasi *Collaborative Governance* karena tidak sesuai dengan kriteria standar pada T-statistic yaitu 1,96.

Kemudian nilai P value pada variabel Kepemimpinan dalam mempengaruhi Implementasi *Collaborative Governance* menunjukkan nilai 0,110 yang mana pada nilai P value tersebut tidak memenuhi kriteria yaitu tidak melampaui batas dari 0,05. Sehingga hipotesis kedua pada variabel Kepemimpinan ditolak dan tidak terbukti.

Uji Hipotesa 3

Ha: Sumber Daya Manusia mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap Implementasi *Collaborative Governance* dalam Kolaborasi antara Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dengan *stakeholder* (JogjaKita). Ho: Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap Implementasi *Collaborative Governance* dalam Kolaborasi antara Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dengan *stakeholder* (JogjaKita).

Disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_a) pada variabel Sumber Daya Manusia memiliki hasil yang sama dengan hipotesis akhir (H_o) sehingga hipotesis pertama (H_a) diterima dan terbukti. Hal ini disebabkan karena hipotesis akhir (H_o) yaitu Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Implementasi *Collaborative Governance* dalam Kolaborasi antara Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dengan *stakeholder* (JogjaKita). Dibuktikan pada tabel diatas menunjukan bahwa variabel Sumber Daya Manusia mempengaruhi Implementasi *Collaborative Governance* dalam Kolaborasi antara Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dengan *stakeholder* (JogjaKita) dengan memiliki nilai T-statistic 2,196 yang menunjukan hasil T-statistic pada variabel Sumber Daya Manusia mempengaruhi Implementasi *Collaborative Governance* dengan kriteria standar pada T-statistic yaitu 1,96.

Sedangkan nilai p value variabel Sumber Daya Manusia terhadap Implementasi *Collaborative Governance* menunjukan nilai 0,028 yang mana pada nilai P value tersebut telah memenuhi kriteria yaitu melampaui batas dari 0,05. Sehingga hipotesis ketiga pada variabel Sumber Daya Manusia pada Implementasi *Collaborative Governance* diterima atau terbukti.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Regulasi, Kepemimpinan, dan Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh yang berbeda terhadap Implementasi *Collaborative Governance* dalam kolaborasi Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dengan *stakeholder*. Variabel Regulasi dan Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan, sedangkan variabel Kepemimpinan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Nilai *R-square* sebesar 0,462 mengindikasikan pengaruh moderat dari ketiga variabel tersebut. Dengan demikian, dalam konteks ini, Regulasi dan Sumber Daya Manusia memainkan peran penting dalam meningkatkan Implementasi *Collaborative Governance*, sementara Kepemimpinan tidak memiliki dampak signifikan dalam kerangka kerja kolaboratif tersebut.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, R. (2021). Digitalisasi Registrasi Desa (LETTER C) Tanah Dalam Optimalisasi Pelayanan Di Tengah Pandemi Covid19 Di Pemerintahan Desa Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2), 255.
- Alfrida, R. M., & Astuti, R. S. (2019). Karakteristik Inovasi E-Service Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang (Studi Kasus Pelayanan Akta Kelahiran Dan Akta Kematian). *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(4), 441–453.
- Andana, O., Kusuma, A., Wasistiono, S., Pitono, A., Pemerintah, P., Jambi, P., Pemerintahan, I., & Negeri, D. (2021). Penerapan Egovernment Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Provinsi Jawa Barat "Implementation of Egovernment in Improving the Quality of Public Service in Department of Invest. *Visioner*, 13(2), 145–157. www.liputan6.com/tekno/read/2499161/
- Atika, K., Nisa, & Mafra, U. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT . PIN (Persero) Pelaksana Pembangkit Bukit Asam Tanjung Enim PENDAHULUAN Tujuan PT . PLN (Persero) yang A . pelayanan listrik untuk menyediakan serta mel. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 17(14), 355–366.
- Budiastuti, D., & Bandur, A. (2018). Validitas dan Reliabilitas Penelitian. In *Binus*. www.mitrawacanamedia.com
- Cahyani, A. D., Suryati, L., Munawaroh, S., & Nasution, R. D. (2022). Transformasi Pelayanan Publik Dalam Implementasi E Governance di Masa New Normal. *Prosiding Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 17–28.
- Cahyarini, F. D. (2021). Implementasi Digital Leadership dalam Pengembangan Kompetensi Digital pada Pelayanan Publik. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 25(1), 47. <https://doi.org/10.31445/jskm.2021.3780>
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). Research Methods In Education. In *Research Methods in Education*. <https://doi.org/10.4324/9781315456539-19>
- Dorania Lumbanraja, A. (2020). Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui E-Government Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 220–231. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.220-231>
- Ipan, Purnamasari, H., & Priyanti, E. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting. *Kinerja*, 18(3), 383–391.
- Juliandi, A. (2018). Structural Equation Model Partial Least Square (Sem-Pls) Dengan SmartPLS. In *Media Gamma*.
- Kusumawardhani, F., & Muanas, M. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(2), 137–146. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i2.372>
- Maria, E., & Halim, A. (2021). E-Government dan Korupsi: Studi di Pemerintah Daerah, Indonesia dari Perspektif Teori Keagenan. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 5(1), 40–58. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i1.4789>
- Muammar, M. A., Parawu, H. E., & Haq, N. (2021). Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap Pelaksanaan Good Governance di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(2), 414–426.
- Nasrullah. (2018). Implementasi Electronic Government Dalam Mewujudkan Good Governance dan Smart City (Studi Kasus: Pemerintah Kota Makassar). *JUSITI: Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi*, 6(2), 23–31.
- Rahmadi, A. N., Jibril, M., & Muhammad, A. (2021). Implementasi E-Government Kota Probolinggo (Studi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Implementation of E-Government in Probolinggo (Study of Presidential Regulation Number 95 of 2018 Concerning Elect. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(3), 1–11.

- <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/8002/6164>
- Rozikin, M., Hesty, W., & Sulikah, S. (2020). Collaboration and E-Literacy: Key Succes Innovation Of Local E-Government. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(1), 61–80. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i1.603>
- Ruijter, E., & Meijer, A. (2020). Open Government Data as an Innovation Process: Lessons from a Living Lab Experiment. *Public Performance and Management Review*, 43(3), 613–635. <https://doi.org/10.1080/15309576.2019.1568884>
- Silsila Asri, & Yahya Krisnawansyah. (2022). Kolaborasi Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan*, 1(1), 27–35. <https://doi.org/10.55850/symbol.v1i1.9>
- Sudiman, S., Fahrudin, W. A., Taufik, T., Subarman, K., & Taufik, A. (2020). Sosialisasi strategi usaha kecil menengah untuk meningkatkan produktivitas pasca pandemi virus COVID19. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 435–438. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL/article/download/6884/4525>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Tasyah, A., Lestari, P. A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., & Tresiana, N. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 18(2), 212–224. <https://doi.org/10.31113/jia.v18i2.808>
- Wahyuni, E., Afistha, N. M., & Nawangsari, E. R. (2020). Model Peningkatan Pelayanan Publik pada Instansi Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik*, 1(1), 1–15. <http://www.jsep.org/index.php/jsep/article/view/1/7>
- Wibawa, I. G. A. (2020). Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Digital Local Government). *Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 57–71.
- Wijoyo, H., & Widiyanti. (2020). Digitalisasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Era Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Kahuripan*, 10–13.
- Yusup, F. (2018). Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 7(1), 17–23. <https://doi.org/10.21831/jorpres.v13i1.12884>